

STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA TERHADAP PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Oleh
Nova Marito Manalu
NIM. 2205040089

ABSTRAK

Rokok elektrik (*vape*) merupakan produk penghantar nikotin elektrik yang penggunaannya terus meningkat dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti peredaran ilegal, penjualan kepada anak di bawah umur, serta penyalahgunaan cairan yang mengandung zat berbahaya. Perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Singapura dalam mengatur peredaran rokok elektrik menjadi isu penting untuk dikaji karena Indonesia menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan, sedangkan Singapura menerapkan kebijakan larangan total (*zero tolerance policy*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta sanksi pidana terhadap peredaran rokok elektrik di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memperbolehkan peredaran rokok elektrik sepanjang memenuhi ketentuan perizinan, cukai, dan pengawasan pemerintah, sedangkan Singapura melarang seluruh bentuk penggunaan, kepemilikan, impor, distribusi, dan penjualan rokok elektrik dengan ancaman denda dan pidana penjara yang lebih berat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menekankan pengendalian dan pengawasan, sementara Singapura menekankan pencegahan melalui larangan total dan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Singapura relatif lebih efektif dalam menekan peredaran rokok elektrik ilegal, sedangkan Indonesia masih menghadapi kendala pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi, pengawasan, dan koordinasi penegakan hukum guna meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat serta mewujudkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Rokok Elektrik, Sanksi Pidana, Perbandingan Hukum, Indonesia, Singapura

A COMPARATIVE STUDY OF CRIMINAL SANCTIONS ON THE DISTRIBUTION OF ELECTRONIC CIGARETTES IN INDONESIA AND SINGAPORE

By
Nova Marito Manalu
NIM. 2205040089

ABSTRACT

Electronic cigarettes (vapes) are electronic nicotine delivery products whose use continues to increase and raises various legal issues, such as illegal distribution, sales to minors, and misuse of liquids containing hazardous substances. The difference in policies between Indonesia and Singapore in regulating the distribution of electronic cigarettes is an important issue to study because Indonesia implements a regulatory and supervisory system, while Singapore implements a total ban (zero tolerance policy). This study aims to analyze and compare the regulations and criminal sanctions for the distribution of electronic cigarettes in Indonesia and Singapore. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative legal approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies, then analyzed qualitatively using descriptive-comparative methods. The results of the study indicate that Indonesia permits the distribution of electronic cigarettes as long as they comply with licensing, excise, and government supervision requirements, while Singapore prohibits all forms of use, possession, import, distribution, and sale of electronic cigarettes with the threat of heavier fines and imprisonment. These differences indicate that Indonesia emphasizes control and oversight, while Singapore emphasizes prevention through a total ban and strict law enforcement. This study concludes that Singapore's legal system is relatively more effective in suppressing the circulation of illegal e-cigarettes, while Indonesia still faces obstacles in oversight and law enforcement. Therefore, Indonesia needs to strengthen regulation, oversight, and coordination of law enforcement to improve public health protection and ensure legal certainty.

Keywords: *E-cigarettes, Criminal Sanctions, Comparative Law, Indonesia, Singapore*